



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.KDR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosi Armitasari, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Terusan Pamenang Perumahan Griya Hasanah Blok A2 Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 22 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kediri, xxxx xxxxx sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri dengan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Kdr, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Maret 2007;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu (dua) orang anak yang bernama;
  1. **ANAK 1**. Perempuan, Tempat /Tanggal Lahir Kediri 7 November 2007, Umur 17 Tahun
  2. **ANAK 2**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Kediri ,9 November 2015 (Telah meninggal dunia)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2024 karena sejak bulan. Januari tahun 2024, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain;
  - Pertengkaran beda prinsip dimana komunikasi yang jelek antara Pemohon dan termohon. Akhirnya menimbulkan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan
  - Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon selalu menuntut akan kebutuhan diluar batas kemampuan Pemohon yang kerja sebagai seorang wiraswasta.
  - Sudah pisah Ranjang dan pisah rumah semenjak Maret tahun 2024
  - Pemohon meninggalkan rumah yang ditempati Bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kandat.
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret .tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak Maret tahun. 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Madya Kediri, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Persidangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

#### **SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan berhasil, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian Hakim berhasil mendamaikan Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada buku register yang disediakan;
3. Membankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim pada hari ini **Rabu** tanggal **11 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 557/Pdt.G/2024/PA.Kdr



Hakim,

ttd

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)